



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 61 /POJK.05/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
12/POJK.05/2014 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN DIREKSI/DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Otoritas Jasa Keuangan
Melalui Kantor OJK/Bupati/Walikota/Pihak lain yang ditunjuk oleh OJK*).....
Jl
.....

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.05/2015, dengan ini kami laporkan bahwa sesuai dengan RUPS/RAT*) PT/Koperasi*) LKM/LKMS*) tanggal bulan tahun telah dilakukan perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah*), yaitu:

	Lama	Baru
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Direktur
Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah
.....

Sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan:

1. Bukti perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang.
2. Risalah Rapat Anggota (untuk LKM yang berbentuk badan hukum koperasi)
3. Data Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru: **)
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari Direksi dan Dewan Komisaris yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
 - 6) tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan
 - 7) tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Komisaris;
 - d. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di

bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;

- e. surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya selama paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
4. Data Dewan Pengawas Syariah baru: **)
- a. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. surat pernyataan bermeterai dari DPS yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari DSN MUI atau sertifikasi pelatihan DPS dari DSN MUI bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

....., tanggal, bulan, tahun
Direksi
PT/Koperasi*) LKM/LKMS*)

.....

*) coret yang tidak perlu

**) pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

MULIAMAN D. HADAD

ttd

Sudarmaji